

SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA SAMPALAN

¹Syifa Pramudita Faddila

²Laras Ratu Khalida

³Santi Pertiwi Hari Sandi

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Buana Perjuangan Karawang

syifa.pramudita@ubpkarawang.ac.id¹, laras.ratu@ubpkarawang.ac.id²,
santi.pertiwi@ubpkarawang.ac.id³

Abstrak

Desa Sampalan menjadi salah satu desa dalam katagori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Tujuan kegiatan ini sebagai upaya agar Desa Sampalan keluar dari katagori kemiskinan ekstrem, maka dibutuhkan sosialisasi peran pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satu upayanya yaitu melalui pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa, meliputi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Metode dalam pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan peserta pengabdian merupakan para aparat desa termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PKK dan anggotanya, serta para pengurus RW maupun RT. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, sebagai indikatornya ialah adanya interaksi berupa informasi dari pihak desa terkait upaya apa yang sudah dilakukan, dan upaya apa yang akan dirancang untuk kegiatan selanjutnya.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Kemiskinan Ekstrem, Desa Sampalan

Abstract

Sampalan Village is one of the villages in the category of extreme poverty in Karawang Regency. The purpose of this activity as an effort to get Sampalan Village out of the category of extreme poverty, it is necessary to socialize the role of the village government in alleviating extreme poverty. One of the efforts is through community empowerment by the village government, including the government's role as a regulator, dynamist, facilitator, and catalyst. The method in this service is carried out in the form of socialization with the service participants, namely village officials including the Village Head, Village Secretary, PKK Chair and its members, as well as RW and RT administrators. It can be concluded that the socialization activities are going well, as an indicator is the interaction in the

Karawang, 28 Februari 2023

form of information from the village regarding what efforts have been made, and what efforts will be designed for further activities.

Keywords: *Village Government, Extreme Poverty, Sampalan Village*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) (Badan Pusat Statistik, 2022).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 sebesar 9,54%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,17 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2021 yaitu 9,71%. Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia (Annur, 2022). Dengan demikian, selama pandemic bahkan sebelumnya, Indonesia mengalami kemiskinan yang cukup mengkhawatirkan.

Menurut Adisasmita (2005) dalam Ferezegia (2018) menyebutkan indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya.

Karawang, 28 Februari 2023

Secara sebaran, yang menjadi wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di tahun 2022 yaitu Jawa Timur (4,181 juta jiwa), kemudian diikuti oleh Jawa Barat (4,070 juta jiwa) (Kencana, 2022). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan angka kemiskinan di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 mencapai 195.410 jiwa atau 8,26% dari jumlah penduduk Karawang yang mencapai 2,3 juta. Dari angka kemiskinan yang mencapai 195.410 jiwa tersebut, sekitar 4,51% atau sebanyak 106.780 jiwa dikategorikan kemiskinan ekstrem (WM, 2021). Di Kabupaten Karawang, kemiskinan ekstrem terjadi di 5 Kecamatan dan 25 Desa, salah satunya Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya (Azzam, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Zuhdiyaty & Kaluge (2018) menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh IPM. IPM merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan manusia di suatu daerah atau negara yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta pendapatan. IPM menurut BPS ada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Sebagai usaha dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Desa Sampalan sangat berhubungan dengan adanya kepedulian dari pemerintah setempat, yaitu dari pemerintah Desa Sampalan. Karena Pemerintah Desa menjadi fokus perhatian dan titik sentral terhadap masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus publik serta dipandang sebagai salah satu langkah yang selaras dalam mengatasi permasalahan sosial, terlebih lagi mengenai kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan oleh berbagai elemen yang dimulai dari pemerintah, dunia usaha serta masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Pemberdayaan menjadi elemen utama yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berkaitan dengan pemberdayaan, pemerintah memiliki peran serta didalamnya yang dimana perlu dilakukan agar dapat berjalan selaras dengan harapan masyarakat (Andini et al., 2022).

ANALISIS SITUASI

Berdasarkan latar belakang di atas, maka benang merah analisis situasi yang dapat dibuat yaitu:

1. Sebanyak 25 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Karawang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
2. Desa Sampalan yang termasuk dalam Kecamatan Kutawaluya menjadi salah satu desa yang tergolong kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dilaksanakan dengan fokus sosialisasi peran pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Desa Sampalan. Peserta pengabdian merupakan para aparat desa termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PKK dan anggotanya, serta para pengurus RW maupun RT.

Metode dalam pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan bantuan media presentasi. Secara detail, metode pengabdian dibagi menjadi tiga tahapan, yakni: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi dan rencana keberlanjutan.

Persiapan

Tahap persiapan abdimas diawali dengan observasi lapangan dan kajian pustaka. Observasi lapangan berguna untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Desa Sampalan, sedangkan kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literature pustaka yang berkaitan dengan tema abdimas yaitu peran pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengabdi terlebih dahulu memastikan bahwa semua keperluan untuk sosialisasi sudah tersedia termasuk bahan presentasinya. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan waktu para peserta, yaitu pada hari Kamis, 21 Juli 2022.

Karawang, 28 Februari 2023



Gambar 1. Sosialisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem Di Desa Sampalan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di tingkat desa yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa itu sendiri. Maka sudah seharusnya pemerintah desa memaksimalkan pemberdayaan tersebut. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Arifin (2012) dalam Andini et al., (2022) menjelaskan bahwa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a. Peran Regulator Pemerintah Desa

Sebagai puncak kendali regulator di wilayah desa, pemerintah desa diharapkan dapat menerbitkan kebijakan serta program-program tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tak hanya itu, pemerintah desa dapat membuat pedoman dasar yang tentu harus ditindaklanjuti sebagai acuan dasar pengelolaan setiap aktivitas dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus menentukan *timeline* dari program-program tersebut. Hal ini berguna untuk melihat sejauh mana capaian dan keberhasilan program yang telah dibuat.

Salah satu program yang dapat dilakukan yaitu membuat data *by name by address*. Dari kebijakan ini, pemerintah Desa Sampalan dapat melakukan sensus terhadap masyarakatnya sendiri terkait kondisi rumah beserta isinya, pendapatan dan pengeluaran, status kesehatan, status sosial, maupun usaha yang dimiliki. Hal ini menjadi sangat penting karena data bersifat dinamis setiap waktu, sehingga ada kemungkinan data tahun lalu akan sangat berbeda dengan data tahun ini karena berbagai faktor. Pendataan ini akan terlihat sangat riil dan dapat membantu Pemerintah Desa melihat status desanya, apakah masih dalam katagori kemiskinan ekstrem atau sudah keluar dari katagori tersebut. Tentunya data ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Desa dan harus dilaporkan kepada pihak Kelurahan bahkan Kabupaten.

b. Peran Dinamisator Pemerintah Desa

Sebagai dinamisator, peran pemerintah desa dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kegiatan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Bentuk riil dari peran dinamisator oleh pemerintah desa yaitu dengan memberikan pelatihan, bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi demi kemajuan desa (Andini et al., 2022).

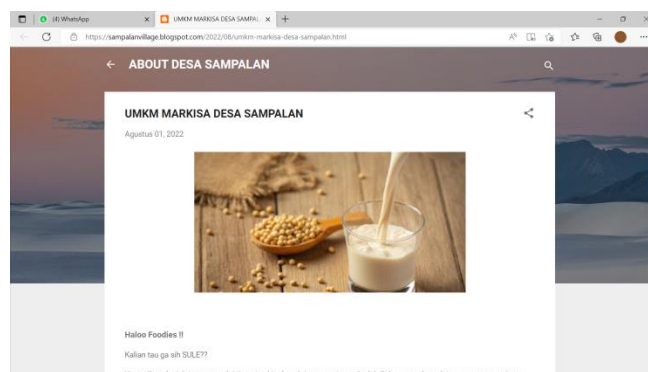
Berdasarkan informasi saat pelaksanaan sosialisasi, di Desa Sampalan khususnya UMKM yang dinaungi ibu-ibu PKK beberapa kali sudah mendapatkan pelatihan, bimbingan dan pengarahan, misalnya pelatihan digitalisasi pemasaran, pembukuan sederhana, maupun peningkatan kualitas produk UMKM di Desa Sampalan oleh para mahasiswa KKN dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Bahkan beberapa sudah di implementasikan dan terus berjalan hingga saat ini.



Gambar 2. Upaya Peningkatan Kualitas Produk Melalui Label Kemasan Produk Susu Kedelai dan Kue Cucur



Gambar 3. Penambahan Ekstrak Rebusan Kayu Secang Pada Susu Kedelai Sebagai Bahan Pengawet Alami



Gambar 4. Pemanfaatan Web Sebagai Media Informasi dan Promosi



Gambar 5. Luaran Pelatihan Digitalisasi Promosi UMKM Susu Kedelai

c. Peran Fasilitator Pemerintah Desa

Sebagai fungsi fasilitator, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, serta menyediakan sarana dan prasarana pembangunan yang terkait dengan permodalan atau pendanaan.

Pada proses sosialisasi, didapatkan informasi bahwa hal-hal yang terkait dengan permodalan atau pendanaan, khususnya untuk UMKM di Desa Sampalan, bisa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa). Sedangkan untuk kegiatan lainnya, seperti pendidikan dan pembangunan desa, masih dalam tanggungan dana pemerintah, baik kabupaten maupun desa.

d. Peran Katalisator Pemerintah Desa

Sebagai katalisator, pemerintah memiliki posisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi guna mendorong laju perkembangan pembangunan (Andini et al., 2022; Firdaus, 2020).

Karawang, 28 Februari 2023

Dalam hal ini, pemerintah Desa Sampalan dapat menggali potensi-potensi yang ada di desanya. Misalnya sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani, maka sumber daya alam dan manusia dalam hal pertanian ini dapat menjadi potensi dan harus dikembangkan untuk kelangsungan dan kepentingan bersama.

Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan

Tahap evaluasi dilakukan dengan melihat luaran dari kegiatan sosialisasi tersebut. Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Desa Sampalan, maka tindak lanjut dari pihak Pemerintah Desa yaitu akan merancang regulasi terkait pendataan *by name by address* yang akan segera dilaksanakan, kemudian membawa hasil UMKM Desa Sampalan baik pada kegiatan Paten di Kelurahan maupun pada kegiatan di Kabupaten, selanjutnya akan mengumpulkan informasi terkait potensi di bidang pertanian agar bisa diangkat dan menjadi unggulan di Desa Sampalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Sampalan menjadi salah satu desa yang masuk dalam katagori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka sebagai upaya agar Desa Sampalan keluar dari katagori itu, dibutuhkan sosialisasi peran pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satu upayanya yaitu melalui pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa, meliputi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, sebagai indikatornya ialah adanya interaksi berupa informasi dari pihak desa terkait upaya apa yang sudah dilakukan, dan upaya apa yang akan dirancang untuk kegiatan selanjutnya.

Diharapkan pemerintah desa dapat segera melakukan implementasi terkait program yang sudah direncanakan agar Desa Sampalan terbebas dari katagori kemiskinan eskترم.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, G., Kurniansyah, D., & Febriantini, K. (2022). PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN KARAWANG KULON. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2055–2062.
- Annur, C. M. (2022). Angka Kemiskinan Indonesia Maret 2022 Terendah Semenjak Pandemi. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi>
- Azzam, M. (2022). Kemiskinan Ekstrem Terjadi di 25 Desa di Karawang, Pemkab Kerahkan Seluruh Dinas. *Wartakota*. <https://wartakota.tribunnews.com/2022/02/17/kemiskinan-ekstrem-terjadi-di-25-des-a-di-karawang-pemkab-kerahkan-seluruh-dinas?page=4>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Ferezegia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3(1), 32–40.
- Kencana, M. R. B. (2022). 10 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5015103/10-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi>
- WM. (2021). Penduduk Miskin Ekstrem di Karawang Capai 106.780 Jiwa. *Beritasatu*. <https://www.beritasatu.com/archive/845051/penduduk-miskin-ekstrem-di-karawang-capai-106780-jiwa#:~:text=Karawang%2C Beritasatu.com - Badan,yang mencapai 2%2C3 juta.>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>